

REFLEKSI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DI TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh: Yoyon Suryono¹

Abstrak

Kajian implementasi pendidikan kecakapan hidup perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran pengalaman implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup pada dua aspek yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan melalui penelitian survey evaluasi kebijakan yang difokuskan di SD dan SLTP di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsep kecakapan hidup mengandung pengertian sebagai suatu kecakapan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mampu menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara produktif mencari serta menemukan solusinya, sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Kecakapan hidup yang dimaksud mencakup kecakapan personal, kecakapan berpikir rasional, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional yang dalam proses pendidikannya dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendidikan berbasis luas dan pendidikan berbasis masyarakat. Hasil penelitian menemukan, pertama, pada sisi isi kebijakan bahwa pendidikan kecakapan hidup di tingkat pendidikan dasar belum diimplementasikan secara baik. Lebih tepat dapat dikatakan bahwa pemahaman para kepala sekolah dan guru atas isi kebijakan dalam implementasi pendidikan kecakapan hidup telah cukup baik. Kedua, pada sisi lingkungan kebijakan dikenali suatu keadaan yang masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek yaitu subyek yang terlibat dan kepentingannya, kejelasan manfaat, rancangan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, faktor pendorong yang memotivasi, penetapan penanggung jawab pelaksana kegiatan, pengadaan sumber daya yang diperlukan, dan kesesuaian dalam pelaksanaannya. Sangat diperlukan suatu skema implementasi yang lebih jelas dan operasional agar pendidikan kecakapan hidup dapat berhasil dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Termasuk di dalamnya disiapkan peraturan yang mengatur kegiatan implementasi, penyediaan segala sumber daya dan proses sosialisasi yang efektif.

Kata Kunci: pendidikan kecakapan hidup, life-skill, implementasi kebijakan

¹ Yoyon Suryono adalah Dosen pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY.

Pendahuluan

Kualitas pendidikan di Indonesia harus diakui masih tergolong rendah. Beberapa studi di tingkat nasional dan komparasi internasional menunjukkan hal tersebut. Hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat SD yang dilaksanakan oleh IEA (*International Educational Achievement*) menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sedangkan untuk tingkat SLTP, studi untuk kemampuan matematika siswa SLTP di Indonesia berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan IPA berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta (Propenas, 2002).

Dalam konteks meningkatkan kualitas pendidikan dasar, salah satu kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah, mampu meningkatkan kreativitas guru, inklusif dan tidak bias gender, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan peserta didik, menunjang peningkatan penguasaan ilmu-ilmu dasar serta keimanan, ketaqwaan dan kepribadian yang berakhlak mulia.

Pada dasarnya secara sosiologis, pendidikan berfungsi menyiapkan peserta didik memasuki kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu akhir-akhir ini dilontarkan pemikiran agar kurikulum pendidikan tidaklah cukup hanya dengan berbasiskan kompetensi dasar. Kurikulum pendidikan haruslah berbasiskan pada kecakapan hidup (*life-skill*) agar dengan demikian peserta didik dapat "hidup" di dalam masyarakatnya.

Dari sudut proses kebijakan, ketercapaian tujuan pendidikan kecakapan hidup berkaitan dengan implementasinya yang mencakup dua hal utama yaitu (1) *content* (isi kebijakan), dan (2) *context* atau lingkungan kebijakan (Grindle, 1980). Isi kebijakan setidaknya menyangkut tujuan yang ingin dicapai, substansi materi kebijakan, dan pengaturan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Sedangkan konteks atau lingkungan kebijakan mencakup siapa-siapa pelaksana yang berperan dan terlibat, manfaat apa yang akan diperoleh, kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan, apa yang menjadi pendorong untuk melaksanakannya, siapa penanggung jawab kegiatan, bagaimana ketersediaan sumber daya yang diperlukan, dan kesesuaian implementasinya.

Mengacu kerangka implementasi pada proses kebijakan, masalah penelitian ini adalah apakah pihak sekolah (terutama kepala sekolah dan guru) telah memahami isi kebijakan dan konteks dari implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup di sekolah-sekolah? Secara lebih rinci masalah penelitian ini menyangkut (1) apakah kepala sekolah dan guru memahami kebijakan umum pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di sekolah dalam hal tujuan yang ingin dicapai, substansi materi, dan persiapan (pengaturan) yang akan dilakukan, dan (2) apakah kepala sekolah dan guru memahami implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di sekolah dalam hal siapa-siapa yang berperan dan terlibat, manfaat yang diperoleh, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, faktor-faktor pendorong, siapa penanggung jawab kegiatan, sumber daya yang disiapkan dan kesesuaian implementasi yang dilakukan.

Secara individual, manusia masa depan harus memiliki apa yang disebut sebagai *human intelligences* yang mencakup *musical intelligence*, *bodily-kinaesthetic intelligence*, *logical-mathematical intelligence*, *linguistic intelligence*, *spatial intelligence*, *interpersonal intelligence*, dan *intrapersonal intelligence* (Gardner, 1993).

Sesuai pendapat Gardner tersebut di atas, tipologi manusia masa depan adalah manusia yang hidup dalam kecenderungan serba kompleks dalam segala aspek kehidupan. Gambaran manusia masa depan adalah manusia teknologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan manusia belajar. Manusia masa depan dicirikan sebagai *Contextualized Multiple People* (Cheng, 2001).

Awal tahun 2002, persekolahan di Indonesia mulai mengembangkan mutu sekolah atas dasar konsep pendidikan kecakapan hidup (*life-skill*) yaitu suatu kecakapan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mampu menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara produktif mencari serta menemukan solusinya sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Tim Broad Based Education, 2001; Indrajati Sidi, 2002).

Kecakapan hidup sebagai kecakapan yang lebih luas dari sekedar keterampilan untuk bekerja atau keterampilan manual, terbagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu: (1) kecakapan mengenal diri/personal (*personal skill*) yaitu penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan, anggota masyarakat, dan warga

negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, (2) kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*) yaitu kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, dan kecakapan memecahkan masalah, (3) kecakapan sosial atau kecakapan antar personal (*social skill*) yaitu kecakapan berkomunikasi dengan empati dan kecakapan bekerjasama, (4) kecakapan akademik atau kemampuan berfikir ilmiah (*academic skill*) yaitu kecakapan mengidentifikasi variabel dan menjelaskan hubungan antara variable, kecakapan merumuskan hipotesis, kecakapan merancang dan melaksanakan penelitian, dan (5) kecakapan vokasional atau kemampuan kejuruan (*vocational skill*) yaitu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat.

Kecakapan mengenal diri, berfikir rasional, dan sosial digolongkan sebagai kecakapan hidup yang bersifat umum (*general-life skill*) yaitu kecakapan yang diperlukan oleh siapapun, baik yang bekerja, yang tidak bekerja, dan yang sedang menempuh pendidikan. Sedangkan kecakapan akademik dan vokasional digolongkan sebagai kecakapan hidup yang bersifat spesifik (*specific life skill*) yaitu kecakapan yang diperlukan seseorang untuk menghadapi problema di bidang khusus/tertentu disebut juga kompetensi teknis (Tim Broad Based Education, 2001; Indrajati Sidi, 2002).

Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendidikan berbasis luas (*Broad Based Education-BBE*) dan pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education-CBE*). Pendekatan pendidikan berbasis luas menekankan pentingnya proses pendidikan yang memiliki muatan *general life skill*, *learning how to learn*, dan *learning how to unlearn*. Sementara itu, pendekatan pendidikan berbasis masyarakat menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat (Tim Broad Based Education, 2001).

Penerapan BBE dan CBE dalam pendidikan kecakapan hidup disesuaikan dengan tujuan pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan yang bersangkutan. Pada jenjang pendidikan dasar (TK/RA, SD/MI dan SLTP/MTs) lebih ditekankan pada pengembangan *general life skill*, di samping (1) mengakrabkan peserta didik dengan perikehidupan nyata di

lingkungannya, (2) menumbuhkan kesadaran tentang makna atau nilai perbuatan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, (3) memberikan sentuhan awal terhadap pengembangan keterampilan psikomotorik, dan (4) memberikan pilihan-pilihan tindakan yang dapat memacu kreatifitas.

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Secara sederhana implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil seperti yang diharapkan. Sebagai serangkaian aktifitas, implementasi kebijakan mencakup langkah-langkah utama (1) persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan, (2) menyiapkan sumberdaya untuk menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, keuangan, dan penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, dan (3) bagaimana menghantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat (Syaukani, Gaffar, dan Rasyid, 2002).

Gridle (1980) telah mengidentifikasi ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi, yaitu Isi Kebijakan dan Konteks dari implementasi itu sendiri. Isi Kebijakan mencakup kepentingan siapa saja yang terlibat, macam-macam manfaat, sejauhmana perubahan akan diwujudkan, tempat pembuatan keputusan, siapa yang menjadi implementor agensi, dan sumberdaya yang disediakan. Konteks kebijakan mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rejim, dan kesesuaian dengan kaidah dan tingkat responsif.

Cara Penelitian

Penelitian ini merupakan survei evaluasi implementasi kebijakan pada dua aspek, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel sekolah (negeri dan swasta) terdiri dari 15 SD/MI dan 20 SLTP/MTs yang tersebar di Kota Yogyakarta dan di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman. Responden terdiri dari kepala sekolah dan guru sebanyak 71 orang dari yang

direncanakan 102 orang. Sampel sekolah dan responden ditetapkan secara purposif.

Data dikumpulkan dengan kuesioner dan wawancara. Kuesioner sebagai instrumen utama berisi dua kelompok pertanyaan, yaitu pertanyaan yang mengungkap aspek isi kebijakan dan pertanyaan yang mengungkap aspek lingkungan kebijakan. Wawancara dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi kelompok untuk menelusur lebih dalam pengalaman implementasi pendidikan kecakapan hidup di sekolah melalui kepala sekolah dan wakil guru. Data yang terkumpul diolah, disajikan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kategorisasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif-empirik dan kemudian dikomparasikan dengan acuan konseptual melalui proses deduksi.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan dalam dua kategori yaitu (1) isi kebijakan yang dilihat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, substansi materi, dan peran institusi yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup, dan (2) lingkungan kebijakan yang dilihat berdasarkan subyek yang terlibat dan peran yang dilakukan, manfaat yang diperoleh, kondisi yang terjadi, faktor pendorong, sumber daya yang harus disiapkan, penanggung jawab kegiatan, dan kesesuaian antara implementasi dengan rancangan kebijakan.

1. Isi kebijakan

Rumusan tujuan yang disajikan oleh responden belum mencerminkan sebagai sesuatu yang ingin diwujudkan melalui pendidikan kecakapan hidup, yaitu aktualisasi potensi siswa, pembelajaran fleksibel, dan optimalisasi pemberdayaan potensi lokal melalui manajemen berbasis sekolah. Rumusan masih merupakan daftar keterampilan yang harus diajarkan oleh sekolah. Meskipun demikian dapat dipahami bahwa ada keinginan agar proses pendidikan persekolahan mampu menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang dapat dipergunakan dan fungsional bagi kehidupannya.

Dari sudut substansi materi, secara umum terdapat kesesuaian antara substansi materi yang dipahami oleh para kepala sekolah dan guru dengan materi konsep pendidikan kecakapan hidup, meskipun dalam rumusan dan

klasifikasi yang agak berbeda. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemahaman atas implementasi pendidikan kecakapan hidup dari sudut muatan materi yang harus dipahami oleh kepala sekolah dan guru, telah dimiliki melalui proses sosialisasi awal, tinggal lanjutannya dalam proses pembelajaran pada siswa untuk mengetahui secara pasti efektivitas pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan di sekolah.

Dilihat dari peran institusi pada tingkat unit organisasi, diperoleh informasi masih adanya tumpang tindih antara peran Depdiknas, Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Peran yang masih memerlukan kejelasan dan menghindari tumpang tindih adalah peran sosialisasi, pendidikan, pelatihan, atau penataran, perubahan kurikulum (termasuk kurikulum muatan lokal), pengadaan buku dan peralatan, dan sumber biaya dan pembiayaan pendidikan.

Seperti di tingkat SD/MI, di tingkat SLTP/MTs pemahaman kebijakan umum pendidikan kecakapan hidup dilihat dari tujuan yang ingin dicapai masih belum bisa memberikan pemahaman dan kejelasan tujuan apa yang ingin dicapai oleh misi pendidikan kecakapan hidup. Rumusan tujuan masih menggambarkan serangkaian materi keterampilan yang harus diajarkan oleh sekolah atau harus dimiliki oleh siswa, yang lebih banyak menekankan pada harapan pengembangan siswa, kurang mengaitkan dengan pengembangan sekolah dan pemberdayaan lokal.

Dari beberapa klasifikasi rumusan yang diperoleh dari lapangan, substansi materi implementasi pendidikan kecakapan hidup di tingkat SLTP/MTs dapat disimpulkan masih belum terpahami secara komprehensif apa yang menjadi materi pokok yang harus dilaksanakan dalam pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup masih dipahami sebagai pendidikan keterampilan dan pendidikan vokasional, yang merupakan sebagian saja dari materi pendidikan kecakapan hidup.

Pemahaman atas peran institusi pada pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di tingkat SLTP/MTs diperoleh kesimpulan bahwa pembagian peran di dalam masing-masing unit masih tumpang tindih dan tidak terjadi stratifikasi pembagian peran dan tugas antar unit. Seperti halnya di tingkat SD/MTS, peran yang masih tumpang tindih di tingkat SLTP/MTS adalah peran sosialisasi, pendidikan, pelatihan atau penataran, perubahan

kurikulum (termasuk kurikulum muatan lokal), pengadaan buku dan peralatan, pengadaan biaya dan pembiayaan pendidikan.

2. Lingkungan kebijakan

Subyek yang terlibat dalam implementasi pendidikan kecakapan hidup sudah dirinci cukup jelas, tetapi kepentingan-kepentingan dan peran yang harus dilakukan oleh setiap subyek belum terungkap secara eksplisit. Ada dua kelompok subyek yang terlibat yaitu subyek dari internal sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan siswa, dan subyek dari luar sekolah seperti orangtua, pengusaha, dan alumni.

Manfaat yang diperoleh dari implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup masih tertuju pada pengembangan siswa. Manfaat selain pengembangan siswa yang dapat dipetik oleh pihak-pihak yang berkepentingan belum terungkap, misalnya manfaat bagi sekolah, masyarakat, atau lingkungannya. Informasi keragaman manfaat yang dapat diperoleh atas pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup sangat diperlukan untuk melihat munculnya berbagai konflik kepentingan yang terjadi di dalam implementasi pendidikan kecakapan hidup.

Pada aspek kegiatan yang harus dilakukan, implementasi pendidikan kecakapan hidup masih banyak diwarnai oleh kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan fungsi-fungsi manajemen dan kegiatan memenuhi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pendidikan keterampilan tangan atau keterampilan vokasional yang bersifat parsial. Suatu skema implementasi dengan serangkaian kegiatan-kegiatan penting yang sistematis dan terjadwal pada tingkat sekolah baik SD/MI maupun SLTP/MTs tidak ditemukan.

Dari sudut faktor pendorong sebagai alasan dilaksanakannya pendidikan kecakapan hidup di sekolah, diperoleh kesimpulan bahwa faktor melaksanakan kebijakan pemerintah (baik pusat, propinsi, maupun daerah otonom), tuntutan kebutuhan anak menghadapi masa depannya, dan pelaksanaan otonomi daerah merupakan alasan-alasan utama dilaksanakannya pendidikan kecakapan hidup. Faktor meningkatkan mutu sekolah dan mutu lulusan dalam arti yang luas kurang dipahami secara utuh sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektifitas sekolah.

Siapa yang menjadi penanggung jawab implementasi pendidikan kecakapan hidup di sekolah? Pertanyaan ini belum secara eksplisit disebut siapa penanggung jawab program dan kegiatan implementasi pendidikan kecakapan hidup di tingkat sekolah maupun birokrasi pemerintah kota atau kabupaten. Kepala Sekolah tidak disebut secara tegas sebagai pelaksana di tingkat sekolah. Demikian juga Kepala Dinas Pendidikan di tingkat Propinsi atau Kota/Kabupaten tidak disebut sebagai penanggung jawab implementasi pendidikan kecakapan hidup di jajaran birokrasi.

Implementasi pendidikan kecakapan hidup di berbagai jenis dan jenjang pendidikan memerlukan ketersediaan segala sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang sudah disiapkan oleh SD/MI dan SLTP/MTs untuk melaksanakan pendidikan kecakapan hidup meliputi peralatan, ruangan, tenaga profesional dan teknisi, peralatan praktikum, dan meminta dukungan dan bantuan dana dari orangtua dan masyarakat. Sumber daya yang diperlukan masih sebatas untuk keperluan pendidikan keterampilan atau pendidikan vokasional.

Dilihat dari sudut peran dan tanggung jawab, kondisi yang terjadi, kesesuaian pelaksanaan dengan rancangan yang ditetapkan, dan tanggapan dari penerima manfaat, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup di sekolah belum sesuai seperti yang dirancang di dalam kebijakan yang ditetapkan. Kepala Sekolah dan Guru belum memiliki peran baru yang jelas di dalam pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup. Orangtua, masyarakat, dan pihak-pihak eksternal lain yang terkait masih diperankan secara konvensional sebagai sumber dana. Penjajagan di dalam praktek menemukan bahwa pendidikan kecakapan hidup disamakan artinya sebagai pendidikan keterampilan tangan dan keterampilan vokasional, sehingga kesesuaian pelaksanaan tidak terjadi dan tanggapan dari berbagai pihak yang menunjukkan keaburan konsep dan operasionalisasinya.

Pembahasan

Pertanyaan pokok penelitian ini adalah apakah pihak sekolah (yang diwakili oleh kepala sekolah dan guru) telah memahami isi kebijakan dan lingkungan kebijakan berkenaan dengan implementasi pendidikan kecakapan hidup di tingkat pendidikan dasar? Hasil penelitian yang disajikan di muka

memberi dasar untuk memberi jawaban bahwa secara umum kebijakan pendidikan kecakapan hidup di tingkat pendidikan dasar belum diimplementasikan secara baik. Lebih tepat dapat dikatakan bahwa pemahaman para kepala sekolah dan guru atas isi kebijakan dalam implementasi pendidikan kecakapan hidup telah cukup baik, namun pada sisi lingkungan kebijakan dikenali suatu keadaan yang masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek. Mengapa masih perlu diperbaiki? Adakah faktor-faktor tertentu yang menyebabkan keadaan yang masih belum baik itu terjadi?

Implementasi memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pada tahap awal diperlukan adanya kejelasan prosedur yang menuntut bagaimana implementasi kebijakan harus dilakukan. Seperti diketahui, implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Secara sederhana implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil seperti yang diharapkan. Implementasi mencakup langkah-langkah utama (1) persiapan seperangkat peraturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan, (2) menyiapkan sumberdaya untuk menggerakkan implementasi termasuk sarana dan prasarana, keuangan, dan penetapan siapa yang bertanggung jawab, dan (3) bagaimana menghantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi pendidikan kecakapan hidup di tingkat pendidikan dasar masih belum berjalan dengan baik, sebab-sebabnya bisa dirunut dari prosedur bagaimana kebijakan pendidikan kecakapan hidup itu harus diimplementasikan. *Pertama*, adakah rumusan kebijakan pendidikan kecakapan hidup dibuat dengan tujuan yang jelas? Sejauh dapat diketahui, rumusan kebijakan pendidikan kecakapan hidup telah dibuat oleh suatu tim antara lain yang dikenal dengan nama Tim *Broad Based Education* (BBE) Depdiknas dalam satu dokumen kebijakan nasional yang cukup lengkap. *Kedua*, adakah persiapan telah dilakukan untuk menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaan baik oleh pusat (Depdiknas) maupun oleh daerah (Dinas Pendidikan Propinsi atau Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten? Jawaban para responden menunjukkan bahwa masih terjadi tumpang tindih peran antar

unit pusat, daerah propinsi dan daerah otonom dalam mengimplementasikan pendidikan kecakapan hidup. Hal ini menggambarkan bahwa kejelasan peran masing-masing unit belum terjadi sehingga banyak peran yang dapat dikerjakan oleh semua unit, tanpa adanya pembagian peran, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Di satu sisi faktor waktu implementasi pendidikan kecakapan hidup yang baru saja dimulai mungkin menjadi alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Tetapi, di sisi lain dituntut adanya kejelasan peran masing-masing yang terlibat di dalam implementasi sebelum implementasi dilaksanakan, dimana hal terakhir ini belum terjadi dan ini menjadi petunjuk bahwa pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup belum dipersiapkan dengan baik.

Kenyataan bahwa pemahaman kepala sekolah dan guru masih sangat bervariasi baik mengenai tujuan, substansi materi, maupun kejelasan peran dalam mengimplementasikan pendidikan kecakapan hidup menunjukkan dan memperkuat kesimpulan bahwa memang pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di sekolah masih belum dipersiapkan dengan baik, walaupun sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakannya dalam konteks program (tepatnya proyek) pendidikan kecakapan hidup dengan pendekatan pendidikan berbasis luas.

Dikenali dalam penelitian ini bahwa sumber daya belum disiapkan secara menyeluruh dan komprehensif. Diakui bahwa pendidikan persekolahan di Indonesia memiliki banyak kendala, jadi sangatlah wajar andaikata di dalam melaksanakan pendidikan kecakapan hidup terjadi ketidaksiapan sumber daya. Masalahnya adalah tuntutan prosedural yang harus dipenuhi bahwa di dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan publik diperlukan persiapan dan penyediaan sumber daya yang memadai. Yang terjadi adalah sebaliknya, belum semua sumber daya dipenuhi. Kalau ada semacam "dana-proyek" tentulah tidak akan dapat menjangkau semua sekolah, hanya beberapa sekolah saja yang kebetulan mendapat rezeki proyek. Pada yang terakhir inipun sangat perlu ditelusuri sejauhmana pemanfaatan dana itu dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan mempersiapkan sumber daya untuk kelancaran implementasi pendidikan kecakapan hidup dalam konsep yang benar. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadi penyempitan pengertian pendidikan kecakapan

hidup sebagai keterampilan tangan dan keterampilan vokasional sehingga sumber daya yang diperlukan pun dipersempit pula maknanya maka yang disediakan adalah tenaga pengajar bahwa sarana dan prasarana yang lain yang dibutuhkan berkualifikasi seperti itu.

Keadaan seperti yang digambarkan itu terjadi diduga karena ketidakjelasan siapa yang harus menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan pendidikan kecakapan hidup. Kepala Sekolah, apalagi guru, tidak secara jelas berada dalam posisi seperti itu. Beberapa jawaban yang diperoleh menggambarkan bahwa motivasi sekolah melaksanakan pendidikan kecakapan hidup lebih sebagai menjalankan kebijakan atasan dan keputusan birokrasi, ketimbang sebagai upaya kolektif untuk meningkatkan mutu sekolah dan mutu lulusannya untuk menghadapi tantangan masa depan yang sangat kompetitif. Alasan klasik seperti itu, melaksanakan kebijakan atasan atau birokrasi memperlemah kekuatan pendidikan kecakapan hidup sebagai solusi rendahnya mutu pendidikan. Beberapa alasan lain yang diperoleh seperti keharusan pemerintah menyiapkan dana, peralatan, tenaga, dan buku memperkuat bahwa pihak sekolah masih diposisikan sebagai pelaksana kebijakan pusat. Belum kelihatan secara jelas, bagaimana sekolah memposisikan dirinya dalam konteks apa yang disebut sebagai manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

Terlihat ada usaha dari pihak sekolah untuk menggali potensi lokal dan bantuan dana dari masyarakat melalui Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah. Usaha ini perlu direspon positif, namun masalahnya adalah seberapa besar kemampuan lokal dan bantuan dana dari orangtua atau masyarakat akan terkumpul? Cukupkah sesuai kebutuhan? Dalam konteks inilah sangat diperlukan tersedianya suatu skema (rancangan) implementasi pendidikan kecakapan hidup yang benar-benar dipersiapkan secara matang dan dihantarkan ke sekolah dan masyarakat dengan baik melalui proses sosialisasi yang cukup waktu, telaten, serius, dan disertai motivasi memajukan mutu pendidikan, tidak sekedar "asal proyek jalan" dan dana terserap habis. Sayangnya hal seperti ini tidak terjadi. Dengan kata lain kebijakan pendidikan kecakapan hidup belum dihantarkan ke sekolah dan masyarakat secara memadai. Sosialisasi yang belum berhasil. Banyak terjadi pemahaman dari kepala sekolah dan para guru tentang pendidikan kecakapan hidup yang

belum sepenuhnya benar baik tentang isi kebijakan: tujuan, materi, peran institusi maupun lingkungan kebijakan atau aspek-aspek implementasi yang lain. Dan ini menjadi penyebab dari tidak terlaksananya dengan baik proses implementasi pendidikan kecakapan hidup di sekolah walaupun disadari bahwa implementasi itu terjadi dalam rentang waktu yang relatif masih sangat pendek ini.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan penelitian ini, pertama, pada sisi isi kebijakan dikenali bahwa pendidikan kecakapan hidup di tingkat pendidikan dasar belum diimplementasikan secara baik. Lebih tepat dapat dikatakan bahwa pemahaman para kepala sekolah dan guru atas isi kebijakan dalam implementasi pendidikan kecakapan hidup telah cukup memadai, namun dalam mengimplementasikannya masih belum baik. Hal ini terlihat pada aspek tujuan pendidikan kecakapan hidup yang kurang dipahami secara jelas, substansi materi yang cenderung dipahami sebagai pendidikan keterampilan dan vokasional, dan masih terjadinya tumpah tindih dalam pemahaman peran institusi.

Kedua, pada sisi lingkungan kebijakan dikenali suatu keadaan yang masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek yaitu subyek yang terlibat dan kepentingannya, kejelasan manfaat, rancangan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, faktor pendorong yang memotivasi, penetapan penanggung jawab pelaksana kegiatan, pengadaan sumber daya yang diperlukan, dan kesesuaian dalam pelaksanaannya.

Berkenaan dengan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diajukan adalah diperlukan suatu skema implementasi yang lebih jelas dan operasional agar pendidikan kecakapan hidup dapat berhasil dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang disusun dengan memperhatikan prosedur implementasi kebijakan yang di dalamnya mempersyaratkan adanya kelengkapan peraturan pelaksanaan, ketersediaan segala sumber daya yang diperlukan, sosialisasi yang akurat yang dapat menghantarkan kebijakan pendidikan kecakapan hidup ke kepala sekolah, guru, siswa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lain pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Cheng, Yin Cheong. (2001). *Paradigm shift in quality improvement in education: Tree waves for the future*. Tersedia di: <http://www.ied.edu.hk/eric/apcelsq>.
- _____ (2001). *New vision of school-based management: Globalization, localization, and individualization*. Tersedia di <http://www.ied.edu.hk/eric/apcelsq>.
- _____ (2001). *Paradigm shift in higher education: Globalization, localization, and individualization*. <http://www.ied.edu.hk/eric/apcelsq>.
- Grindle, M. S, ed. (1980). *Politics and implementation in the third world*. New Jersey: Princeton University Press.
- Indrajati Sidi. (2002). *Konsep pendidikan kecakapan hidup (life-skill) melalui pendekatan pendidikan berbasis luas (Broad Based Education-BBE)*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Depdiknas.
- Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Semiawan, Conny R. (2000). "Kebijakan pendidikan dasar masyarakat baru Indonesia". *Makalah seminar di Program Pascasarjana UNY 23 September 2000*.
- Tim Broad Based Education Depdiknas. (2002). *Konsep pendidikan berorientasi pada kecakapan hidup (life-skill education)*. Buku I, II, dan III. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia—Nomor 25 Tahun 2000 Tentang *Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004*.